



POHON KINERJA
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

STAKEHOLDER
PERSPECTIVE

CUSTOMER
PERSPECTIVE

TUJUAN
“Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah”

SS. 1. Optimalnya Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
SS.2. Optimalnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Biro
IKK.1. Persentase Pelayanan Kebijakan di Bidang Perekonomian/Pengendalian Inflasi
IKK.2. Persentase Pelayanan Kebijakan di Bidang Administrasi Pembangunan
IKK.3. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

LEARN & GROWTH

SS.2. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
IKK.4. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian
IKK.5. Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD

SS.3. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
IKK.6. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan

SS.4. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian
IKK.7. Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Perekonomian

SS.5. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian
IKK.8. Jumlah Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam

SS.6. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
IKK.9. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

SS.7. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
IKK.10. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

SS.8. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
IKK.11. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

SS.9. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
IKK.12. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN

SS.10. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
IKK.13. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

SS.11. Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
IKK.14. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan

IKK.15. Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

IKK.16. Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

IKK.17. Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

IKK.18. Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan